



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan oleh Hakim dalam sidang istbat nikah telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1812030410980001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 18120158010330004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Twg, pada tanggal 24 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Para Pemohon telah menikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I, dihadapan penghulu yang bernama "Muhammad Ali" selaku Petugas Pencatat Pernikahan (P3N), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah bernama "Dian" sebagai Ayah kandung Pemohon II, dengan

Hal. 1 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa emas cincin, seberat 3 gram dan disaksikan oleh Dua orang saksi bernama: Nimbang Raja dan Junaidi;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Januari 2022;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan persusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke 3 (tiga) yang mengganggu terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama;
 - a) xxxxxxxxxxxxxx, umur 7 bulan, dan saat ini dalam asuhan bersama;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus persyaratan pendaftaran persyaratan sekolah anak dan buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Tiyuh Daya Sakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan Nomor **149.1/067/GR-TBU/TUBABA/I/2022** 26 Januari 2022 yang telah diketahui oleh Kepala xxxxx xxxxxx xxxx dan Camat Tulang Bawang Udik. Oleh sebab itu, mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk

Hal. 2 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2018 di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Twg bertanggal 24 Maret 2022, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, **NIK** 1812030410980001 tanggal 8 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, **NIK** 18120158010330004, tanggal 8 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil

Hal. 3 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg



xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Asli surat keterangan pernikahan belum tercatat Nomor **B-0049/KUA 08.12.02/PW.00/01/2022** tertanggal 27 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi:

1. **xxxxxxxxxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.001, RW.001, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Pemohon I, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 21 Februari 2018;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Februari 2018 di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dian dan saksi nikah pada saat itu adalah Nimbang Raja dan Junaidi serta mas kawin berupa Cincin Emas seberat 3 Gram dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orang

Hal. 4 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon I di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sampai sekarang, dan telah dikaruniai satu (1) orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak pernah tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Pemohon I, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 21 Februari 2018;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Februari 2018 di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dian dan saksi nikah pada saat itu adalah Nimbang Raja dan Junaidi serta mas kawin berupa Cincin Emas seberat 3 Gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orang

Hal. 5 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg



tua Pemohon I di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sampai sekarang, dan telah dikaruniai
satu (1) orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak pernah tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Twg bertanggal 24 Maret 2022 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang

Hal. 6 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018 di rumah orang tua Pemohon I di xxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Tulang Bawang Udik menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I dan saksi nikah pada saat itu adalah Nimbang Raja dan Junaidi serta mas kawin berupa Cincin Emas seberat 3 Gram dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P.3, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta bukti surat P.1 s.d. P.3 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.3 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri dan Para Pemohon adalah penduduk Kecamatan Tulang Bawang Udik, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah

Hal. 7 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan saksi pertama dan kedua menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas, Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 21 Februari 2018, di xxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Tulang Bawang Udik, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dian dan saksi nikah pada saat itu adalah Nimbang Raja dan Junaidi serta mas kawin berupa Cincin Emas seberat 3 Gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau *murtad*;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alat hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 8 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **setelah** berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV: 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W8-A13/432/HK.05/3/2022, yang dikeluarkan oleh wakil Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tanggal 24 Maret 2022, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2018 di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tahun 2022 membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Ramadhan 1443 Hijriyah**, oleh **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim

Hal. 10 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg



Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Proses	Rp50.000,00
2.	Panggilan	Rp330.000,00
	Jumlah	Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal., Penetapan No.38/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)